

REVITALISASI PERAN MUHAMMADIYAH DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Qhanita Wulandari Arif¹, Waode Helvi Mei Hamka², Muhammad Haliq As`sam³,
Dahlan Lama Bawa⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Makassar
wul4ndariariff@gmail.com

ABSTRACT

Muhammadiyah is a modern Islamic organization that plays a strategic role in the life of the nation and state in Indonesia. Since its founding, Muhammadiyah has been committed to integrating Islamic values with evolving social realities. The development of globalization, digitalization, and increasingly complex social, political, and economic dynamics demand the strengthening and renewal of Muhammadiyah's role to remain relevant, adaptive, and able to respond to the challenges of the times. In this context, Muhammadiyah functions not only as a religious organization, but also as a civil society force that contributes to national development. This study aims to analyze the rise of Muhammadiyah's role in national politics, the national economy, and women's empowerment. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method from various scientific sources, journal articles, and official Muhammadiyah documents published in the last five years. The results show that Muhammadiyah plays a moral role in national politics by maintaining public morality, democratic values, and the basic principles of social justice. In the economic field, Muhammadiyah contributes by developing charitable enterprises based on Sharia law and promoting independence, economic equality, and community welfare. At the same time, Muhammadiyah, through its independent organization, Aisyiyah, plays an active role in women's empowerment through education, health, economics, and women's rights advocacy. The revival of Muhammadiyah's role in these three areas is crucial to strengthening the organization's contribution to building a progressive, just, and civilized Islamic society in the contemporary world.

Keywords: Muhammadiyah, National Politics, Community Economy, Women's Empowerment, Revitalization.

ABSTRAK

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang memainkan peran strategis dalam kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks menuntut penguatan dan pembaharuan peran Muhammadiyah agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menanggapi tantangan zaman. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berfungsi tidak

hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan masyarakat sipil yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebangkitan peran Muhammadiyah dalam politik nasional, ekonomi nasional, dan pemberdayaan perempuan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka dari berbagai sumber ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen resmi Muhammadiyah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memainkan peran moral dalam politik nasional dengan menjaga moralitas publik, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Di bidang ekonomi, Muhammadiyah berkontribusi dengan mengembangkan usaha amal berdasarkan hukum Syariah dan mempromosikan kemandirian, kesetaraan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, Muhammadiyah, melalui organisasi independennya, Aisyiyah, memainkan peran aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi hak-hak perempuan. Kebangkitan peran Muhammadiyah di ketiga bidang ini penting untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam membangun masyarakat Islam yang progresif, adil, dan beradab di dunia kontemporer.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Politik Kebangsaan, Ekonomi Umat, Pemberdayaan Perempuan, Revitalisasi.

A. Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam modern terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mengusung semangat tajdid (pembaruan) yang menekankan integrasi nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia modern, Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan masyarakat

sipil (*civil society*) yang berkontribusi aktif dalam penguatan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia (Amin & Malik, 2025)

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan dinamika politik nasional menghadirkan tantangan baru bagi organisasi kemasyarakatan Islam. Tantangan tersebut mencakup melemahnya etika politik, ketimpangan ekonomi, serta meningkatnya persoalan kesetaraan gender. Dalam situasi ini, Muhammadiyah dituntut untuk

melakukan revitalisasi peran agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Revitalisasi dimaknai sebagai upaya pembaruan strategi, penguatan kapasitas organisasi, dan penyesuaian pendekatan dakwah sesuai perkembangan zaman (Hanafiah & Humaidi, 2025).

Dalam bidang politik, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai organisasi yang tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi aktif dalam politik kebangsaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya moralitas publik, keadilan sosial, dan etika demokrasi dalam kehidupan bernegara. Muhammadiyah berperan sebagai kekuatan moral yang mengawal kebijakan publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Supardiono et al., 2025).

Selain politik, peran Muhammadiyah dalam bidang ekonomi umat juga sangat signifikan. Melalui pengembangan amal usaha seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, rumah sakit, dan perguruan tinggi, Muhammadiyah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Namun, tantangan ekonomi global dan transformasi digital menuntut adanya pembaruan tata kelola dan strategi ekonomi agar amal usaha Muhammadiyah mampu berdaya saing dan berkelanjutan (Mutaqin et al., 2025)

Pemberdayaan perempuan menjadi pilar penting lainnya dalam gerakan Muhammadiyah melalui organisasi otonom Aisyiyah. Aisyiyah telah lama berperan sebagai pelopor gerakan perempuan Islam berkemajuan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi hak-hak perempuan. Di tengah masih kuatnya ketimpangan gender dan tantangan struktural yang dihadapi perempuan, peran Aisyiyah menjadi semakin relevan dalam mendorong perempuan sebagai subjek pembangunan dan agen perubahan sosial (Nasution & Hasanah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai revitalisasi peran Muhammadiyah dalam bidang politik, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran Muhammadiyah pada ketiga bidang

tersebut serta menegaskan urgensi revitalisasi sebagai strategi penguatan kontribusi Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan, adil, dan berkeadaban di era kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis revitalisasi peran Muhammadiyah dalam bidang politik kebangsaan, ekonomi umat, dan pemberdayaan perempuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran, konsep, dan dinamika sosial

yang berkembang dalam gerakan Muhammadiyah, tanpa menggunakan pengukuran kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan memanfaatkan sumber pustaka berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen resmi Muhammadiyah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi, pengelompokan, dan interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan sistematis mengenai urgensi revitalisasi peran Muhammadiyah di era kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Muhammadiyah dalam Bidang Politik Kebangsaan

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam dinamika politik kebangsaan Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan komitmen nasionalisme. Sebagai organisasi Islam moderat yang berlandaskan tajdid, Muhammadiyah mempromosikan prinsip politik yang berfokus pada

moralitas, etika, dan keadilan sosial tanpa terlibat dalam politik praktis sebagai partai politik. Pendekatan ini dikenal sebagai dakwah konstitusional, yakni upaya Muhammadiyah untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui prinsip keadilan dan moralitas Islam di ruang publik dan politik (Hanafiah & Humaidi, 2025).

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang kompleks, Muhammadiyah juga berperan dalam menguatkan kesadaran

demokrasi di tengah masyarakat. Melalui pemberdayaan literasi politik dan pendidikan nilai moral dalam proses politik, Muhammadiyah turut mendukung pembentukan warga negara yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dalam praktik Baitul Arqom dan program pendidikan politik yang mendorong sikap pemilih yang rasional dan beretika dalam pemilihan umum (Supardiono et al., 2025).

Selain itu, Muhammadiyah konsisten pada prinsip netralitas politik praktis tetapi aktif dalam isu kebangsaan yang berdampak pada stabilitas sosial dan demokrasi. Peran ini ditandai dengan kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi inklusif serta stabilitas pemerintahan melalui advokasi kebijakan yang mendukung good governance dan kesejahteraan sosial (Prasetyo & Etwina, 2024)

Organisasi ini juga memperkuat nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan menanamkan semangat toleransi dan pluralisme dalam berbagai forum kajian dan pendidikan yang diselenggarakan. Peran tersebut

tidak hanya memperkaya diskursus politik nasional tetapi juga membantu memperkuat identitas nasional yang inklusif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Amin & Malik, 2025)

Dengan demikian, revitalisasi peran Muhammadiyah dalam politik kebangsaan masih sangat relevan untuk menjaga moralitas publik, memperkuat demokrasi yang sehat, dan memperkuat jati diri kebangsaan Indonesia dalam menghadapi dinamika global saat ini.

Lebih lanjut, peran Muhammadiyah dalam politik kebangsaan juga tercermin melalui sikap kritis-konstruktif terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak sejalan dengan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan konstitusi. Melalui pernyataan resmi, rekomendasi kebijakan, serta forum-forum intelektual, Muhammadiyah menjalankan fungsi moral force yang mengingatkan negara agar tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum.

2. Peran Muhammadiyah dalam Bidang Ekonomi Umat

Muhammadiyah berkontribusi dalam ekonomi umat melalui pengembangan amal usaha ekonomi berbasis syariah, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang rentan, yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Hijriah et al., 2020).

Operasional BMT yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam bukan sekadar transaksi finansial, tetapi juga pemberdayaan anggota melalui pembiayaan produktif dan pembinaan usaha. Hal ini selaras dengan temuan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dalam operasional BMT dapat meningkatkan kemandirian ekonomi anggota dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan lokal (Azzahro et al., 2025).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam ekonomi syariah juga terlihat melalui pengembangan

koperasi syariah dan pendidikan literasi ekonomi yang membantu masyarakat memahami mekanisme ekonomi Islam serta memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Literasi ekonomi syariah penting untuk memastikan bahwa anggota komunitas mampu memanfaatkan peluang di tengah era digital dan ekonomi global yang kompetitif (Purnamasari et al., 2025).

Peran Muhammadiyah juga memiliki dampak pada pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, termasuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Peran BMT dan unit usaha lainnya membantu menciptakan peluang usaha produktif yang inklusif bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses ekonomi formal (Vebriyani et al., 2024).

Revitalisasi peran ekonomi Muhammadiyah perlu fokus pada penguatan tata kelola, inovasi digital, serta integrasi jaringan ekonomi antarwilayah agar kontribusi organisasi dalam pemberdayaan ekonomi umat lebih efektif dan berkelanjutan.

Keberadaan BMT dan unit usaha ekonomi Muhammadiyah berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi berbasis komunitas yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Model ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi anggota dan masyarakat sekitar. Pendekatan tersebut memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai aktor strategis dalam pengembangan ekonomi umat yang berkeadilan sosial dan berlandaskan nilai-nilai syariah (Hijriah et al., 2020).

Dalam konteks transformasi ekonomi digital, Muhammadiyah didorong untuk mengadaptasi sistem pengelolaan usaha ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi finansial. Digitalisasi layanan BMT dan koperasi syariah dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan dana, serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penguatan literasi ekonomi syariah

agar masyarakat mampu bersaing dan bertahan dalam dinamika ekonomi modern (Purnamasari et al., 2025).

Selain aspek kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pembinaan manajemen keuangan syariah, Muhammadiyah berupaya menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing. Upaya ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas, khususnya bagi kelompok perempuan dan pelaku UMKM (Vebriyani et al., 2024).

Dengan demikian, peran ekonomi Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada penyediaan akses permodalan, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan sinergi antarunit usaha, peningkatan tata kelola, serta inovasi berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk

memastikan kontribusi Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat semakin optimal dan relevan dengan tantangan ekonomi global (Azzahro et al., 2025).

3. Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan fokus penting dalam gerakan Muhammadiyah melalui organisasi otonomnya, Aisyiyah. Aisyiyah berperan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi hak perempuan (Nasution & Hasanah, 2025).

Partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial dan ekonomi melalui program-program yang diselenggarakan Aisyiyah membantu mengatasi ketimpangan gender dan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengambil peran aktif di ranah publik dan ekonomi (Sitepu et al., 2025).

Peran Aisyiyah juga mencakup advokasi hak perempuan sehingga isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi struktural dan kekerasan berbasis gender mendapat perhatian dalam kebijakan publik. Hal ini penting dalam konteks pembangunan sosial yang adil dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat (Nasution & Hasanah, 2025).

Kontribusi Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan juga dijelaskan sebagai usaha menjalin tradisi dan modernitas, yakni menggabungkan nilai-nilai Islam berkembang dengan kebutuhan modern perempuan dalam dunia pendidikan dan kemandirian ekonomi. Upaya ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang secara personal maupun profesional (Putri et al., 2024).

Dengan demikian, revitalisasi peran pemberdayaan perempuan Muhammadiyah melalui pendekatan yang lebih strategis, digital, dan terintegrasi akan memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Aisyiyah berperan sebagai ruang penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui berbagai program kaderisasi dan pelatihan berbasis komunitas. Program-program tersebut mendorong perempuan untuk memiliki kepercayaan diri, kemampuan organisasi, serta kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan perempuan dan keluarga. Pendekatan ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan sosial (Nasution & Hasanah, 2025).

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Aisyiyah secara konsisten mengelola lembaga pendidikan anak usia dini, sekolah, serta layanan kesehatan ibu dan anak yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan. Layanan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. Integrasi nilai

keislaman dan profesionalisme menjadi ciri khas kontribusi Aisyiyah dalam sektor ini (Putri et al., 2024).

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan Aisyiyah diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan usaha mikro, serta pemanfaatan teknologi digital. Strategi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memperluas akses pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar perempuan dalam struktur ekonomi rumah tangga dan komunitas (Sitepu et al., 2025).

Dengan demikian, peran Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga pada transformasi sosial yang berkelanjutan. Penguatan sinergi antarprogram, inovasi berbasis teknologi, serta advokasi kebijakan yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memastikan kontribusi perempuan Muhammadiyah semakin

signifikan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan

berkeadilan (Nasution & Hasanah, 2025).

D. Kesimpulan

Muhammadiyah memiliki peran strategis sebagai organisasi Islam modern yang berkontribusi signifikan dalam bidang politik kebangsaan, ekonomi umat, dan pemberdayaan perempuan. Dalam ranah politik kebangsaan, Muhammadiyah berperan sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang mengawal nilai-nilai etika publik, keadilan sosial, dan demokrasi melalui pendekatan politik kebangsaan tanpa terlibat dalam politik praktis. Peran ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai bagian penting dari masyarakat sipil yang menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah menunjukkan kontribusi nyata melalui pengembangan amal usaha berbasis syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi, serta unit usaha di sektor pendidikan dan kesehatan. Amal usaha tersebut berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang mendorong kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan

ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sementara itu, melalui organisasi otonom Aisyiyah, Muhammadiyah berperan penting dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi, serta advokasi hak-hak perempuan sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif.

Revitalisasi peran Muhammadiyah dalam ketiga bidang tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan inovasi strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Penguatan sinergi dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga menjadi langkah strategis untuk memastikan kontribusi Muhammadiyah tetap relevan dan optimal dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Malik, A. (2025). Peran Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Pembangunan Identitas Nasional Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 1–21.
- Azzahro, Z., Aisyah, N., Priyatna, A., & Faizal, R. T. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Operasional BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), Pp. 254-271. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1635>
- Hanafiah, Y., & Humaidi, N. M. (2025). Dakwah Konstitusional Muhammadiyah: Antara Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan di Era Post Truth. *Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 8(1), 33–50.
- Hijriah, S., Mufid, N. A., Safitri, M., Komarudin, & Jannah, M. (2020). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(6), 514–527.
- Mutaqin, M. N., Said, M., Herman, E., & Susanti, S. (2025). *The strategic role of Muhammadiyah in developing the sharia economic ecosystem in Indonesia*. 2, 3090–4811.
- Nasution, A. N., & Hasanah, A. N. (2025). Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan : Pandangan Muhammadiyah Terhadap Isu Perempuan. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 34–41. <https://doi.org/10.30596/jippi.v3i1.87>
- Prasetyo, S. A., & Etwina, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah Dalam Penguatan Demokrasi Dan Stabilitas Pemerintahan Di Indonesia. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(4), 175–185. <https://doi.org/10.62083/zhly67s73>
- Purnamasari, D. N. I., Siswoyo, S., Supriyanto, S., & Cahyati, Y. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Pendampingan di BMT Terate Jaya Palang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3406–3413. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3>

- i7.2996
Putri, G. A., Utami, A. A., Khairani, Y.,
Lubis, A. A., Wismanto, &
Ramashar, W. (2024).
Kemuhammadiyah dan
Pemberdayaan Perempuan:
Menjalin Tradisi dan Modernitas.
Jurnal Budi Pekerti Agama Islam,
3(1), 18–23.
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.838>
- Sitepu, Z. A. R. B., Masithoh, Mahyuni,
& Nur Zannah. (2025).
Muhammadiyah Dan
Pemberdayaan Perempuan
Melalui Organisasi Aisyiyah.
Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan
Sosial & Humaniora, 3(1), 88–95.
<https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.728>
- Supardiono, Soesilo, G. B. ., &
Santosa, A. B. (2025). Peran
Muhammadiyah Dalam
Membangun Etika Politik dan
Kesadaran Demokrasi Dalam
Pilkada Melalui Baitul Argom.
Surya Abdimas, 9(4), 697–708.
- Vebriyani, D., Syahrizal, A., & Ramli,
F. (2024). Meningkatkan
Pemberdayaan UMKM (Studi
pada BMT AL-ISHLAH Kota
JAMBI). *Jurnal Akademik
Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3),
63–77.